

*Kedaulatan Ekonomi dan Kebaikan Bersama:  
Sebuah Refleksi Filsafat Bersama Frans Seda*

**Mikhael Dua**

**ABSTRAKSI:** Masalah kedaulatan ekonomi sudah berkembang demikian kompleks terkait perkembangan di akhir Abad XX dengan kedigdayaan pasar, kebangkitan rezim perdagangan dan kerjasama supranasional di Amerika, Eropa, Asia Tenggara, dan Asia Timur, serta proses desentralisasi dan peraturan-peraturan hukum nasional berhadapan dengan tren yang ada. Dalam khazanah arti mengenai kedaulatan ekonomi itulah Frans Seda mengajukan pemikirannya tentang perlunya campurtangan Negara dalam pasar yang didasari oleh visi tentang manusia, peran masyarakat, dan kesejahteraan umum. Keyakinan itulah yang dipercaya akan menghasilkan hubungan harmonis antara pasar, Negara, dan masyarakat tanpa mengabaikan salah satu.

**KATA KUNCI:** Kesejahteraan umum, pribadi manusia, nasionalisme, pasar, filsafat ekonomi, peran masyarakat.

**ABSTRACT:** *The issue of economic sovereignty has become more complex by several related developments in the late 20<sup>th</sup> century because of the new prominence of the market, of the emergence of supranational regional trade and cooperation regimes in the Americas, Europe and Southeast and East Asia, and of the decentralization process and the new role of local jurisdictions in the process of coping with these trends. In such complex meanings of economic sovereignty Frans Seda brings forward a thesis that whatever appropriate mix of state intervention and free markets which will be chosen, it should be first of all based on a vision about the human person, the role of the society and the ideal of common good. That does lead to a balance between market-state-society and not to marginalization either of the state, or the market, or the society.*

**KEY WORDS:** *Common good, human person, nationalism, market, philosophy of economics, the role of society.*

## 1. PENDAHULUAN

Gagasan kedaulatan di bidang ekonomi bakal menjadi jargon utama kebijakan ekonomi lima tahun ke depan (2014-2019). Berbekal keberhasilan (dan juga kegagalan) pemerintahan sebelumnya dalam bidang politik, perundang-undangan, dan penataan pemerintahan yang bersih dari korupsi, pemerintahan baru berjanji akan memberikan perhatian pada masalah keadilan ekonomi, kesejahteraan umum yang dapat dinikmati oleh masyarakat bawah, dan penataan budaya kreatif untuk menunjang kedaulatan ekonomi. Secara ideologis, kebijakan pemerintahan baru tersebut memiliki pautan yang sangat erat dengan bagaimana keIndonesiaan dikembangkan dalam ranah ekonomi. Ada keinginan kuat agar Indonesia benar-benar memiliki kekuatan ekonomi yang pantas dibanggakan, tidak semata-mata untuk dapat bersaing dengan banyak Negara lain di belahan bumi ini, tetapi terutama agar rakyat benar-benar menjadi pelaku ekonomi yang kreatif dan pantas diperhitungkan dunia.

Gagasan ekonomi tersebut bukanlah hal yang baru dalam pemikiran para pemikir ekonomi pasca kemerdekaan. Di bawah konsep Trisakti Soekarno, yang bertujuan agar bangsa ini berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, banyak pemikir ekonomi memahami dengan benar bahwa kegiatan ekonomi tidak dapat lepas dari usaha untuk menjadi Indonesia.

Dalam diskursus ekonomi, pemikiran dasar tersebut di atas memiliki hubungan intrinsik dengan gagasan kedaulatan ekonomi. Gagasan tersebut terutama memiliki tiga implikasi. Pertama, kedaulatan ekonomi memiliki konteks pergulatan bangsa untuk menjadi diri sendiri dalam hal mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri. Kedua, dalam konteks sejarah pergulatan

bangsa, kedaulatan ekonomi memberikan sumbangan yang khas tentang apa artinya menjadi Indonesia: apakah Indonesia menjadi sebuah negara yang terbuka atau yang tertutup. Dan ketiga, karena selain produksi kegiatan ekonomi menyangkut juga relasi dagang dengan banyak negara, konsep kedaulatan ekonomi membuka perspektif kita tentang apa artinya keIndonesiaan atau apa artinya menjadi pribadi Indonesia. Dengan demikian, kedaulatan ekonomi tidak hanya memiliki kaitan dengan kepentingan nasional, tetapi juga berhubungan dengan hal keterlibatan warga dan jejaring internasional.

Tulisan ini merupakan sebuah refleksi filsafat<sup>1</sup> atas gagasan kedaulatan ekonomi dalam pemikiran Frans Seda, seorang mantan Menteri Perkebunan pada masa Pemerintahan Soekarno dan Menteri Keuangan pada awal pemerintahan Orde Baru. Di kalangan para ekonom Indonesia Frans Seda tentu tidak mewakili sebuah aliran ekonomi, tetapi dikenal karena kebebasannya dalam memberikan pandangan ekonomi berdasarkan akal sehatnya dan hati nuraninya, terutama berkenaan dengan fungsi ekonomi bagi kepentingan bersama atau kepentingan nasional. Dengan orientasi penalaran akal sehat tersebut, tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar seperti apakah kedaulatan ekonomi menjadi sebuah konsep yang membawa kesejahteraan bersama; bagaimana keterlibatan warga Negara sebagai subyek ekonomi dijamin dalam gagasan tersebut; dan apakah kedaulatan ekonomi menjadi cerminan bagi solidaritas antara bangsa?

## 2. KEDAULATAN EKONOMI

Ketika Frans Seda merayakan ulang tahunnya yang ke-80, Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta mengundang J.J.A.M. van Gennip untuk membawakan sebuah makalah dengan judul: “Reconstructing the Indonesian

Economic Sovereignty”.<sup>2</sup> Sebagaimana dikemukakan van Gennip, gagasan kedaulatan ekonomi itu sendiri mengandung makna yang amat kaya apabila kita melihatnya dalam perspektif sejarah pergulatan sebuah bangsa. Terutama dalam konteks setelah Indonesia merdeka, kedaulatan ekonomi tidak bisa lepas dari kedaulatan negara yang baru merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dari kolonialisme. Dalam konteks pergulatan bangsa tersebut, kedaulatan negara berarti sebuah negara ingin mengatur dirinya, dengan seluruh kekuatan domestiknya, tanpa harus ditentukan oleh kekuatan, pemerintahan, dan kontrol kekuatan asing.

Konsep kedaulatan negara tersebut memiliki banyak segi, seperti politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, dan budaya. Dan terutama dalam bidang ekonomi, kedaulatan ekonomi berarti negara bangsa memiliki otoritas untuk mengontrol proses ekonomi, termasuk di dalamnya kontrol pembangunan moneter dan finansial serta perdagangan nasional dan internasional. Yang menarik perhatian kita adalah kedaulatan ekonomi tersebut kerap kali dipahami dalam arti nasionalisme ekonomi, sebuah gagasan kunci yang kerap dibicarakan pada periode-periode awal kemerdekaan hingga jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998.

Dalam cita-cita kedaulatan negara tersebut, kedaulatan ekonomi atau nasionalisme ekonomi mengandung beberapa ciri. Pertama, pembangunan ekonomi menjadi tugas negara. Ini menjadi amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tugas tersebut menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan kontrol yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hingga jatuhnya Orde Baru, pemerintah pusat memiliki tanggung jawab memimpin proses pembangunan ekonomi dengan cara mengembangkan strategi intervensi pembangunan

itu sendiri. Kedua, kedaulatan ekonomi atau nasionalisme ekonomi berarti pemerintah pusat memiliki wewenang menggunakan semua sarana dan prasarana ekonomi seperti pengukuhan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) atas rencana pembangunan ekonomi jangka panjang dan jangka pendek, Bank Sentral yang memberikan dukungan finansial, Program-program Pembangunan yang membutuhkan keahlian ekonomi dan teknik, penasehat ekonomi luar negeri, perlindungan terhadap industri-industri kecil dan menengah, bantuan Bank Dunia dan IMF.

Pendekatan nasionalisme ekonomi ini menjadi ideologi pembangunan yang memiliki rentangan waktu mulai dari Soekarno hingga Presiden B.J. Habibie dengan cirinya masing-masing. Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta membungkus gagasan ini dalam motif melawan kolonialisme politik dan ekonomi dalam prinsip-prinsip gotong royong, berdiri di atas kaki sendiri, dan sosialisme ala Indonesia. Kritik Soekarno pada kapitalisme berangkat dari motif “kepedulian fundamental terhadap rakyat kecil, kemiskinan, dan kebodohan rakyat banyak, suatu kepedulian sosial.”<sup>3</sup> Penerusnya Soeharto mengembangkan gagasan nasionalisme ekonomi ini dalam pendekatan yang lebih pragmatis melalui program-program pembangunan jangka panjang (25 tahun) dan jangka pendek (5 tahun). Promosi sektor nonminyak pada tahun 1970 dan 1980-an diambil selain dalam semangat untuk mengurangi ekspor minyak juga dalam semangat nasionalisme ekonomi. Keyakinan Habibie agar Indonesia segera tinggal landas dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta strategi industrialisasi memiliki motif yang sama yaitu pengembangan ekonomi nasional untuk mendukung kedaulatan ekonomi dan kepentingan-kepentingan nasional.

Gagasan kedaulatan ekonomi menjadi perhatian utama ketika Indonesia memasuki suasana globalisasi. Dalam situasi di mana globalisasi mendorong integrasi kapitalisme pasar dengan stimulus perkembangan yang cepat di bidang teknologi informasi dan aliran modal internasional dengan akibat memperlemah peranan negara bangsa, banyak politisi dan ahli meragukan kemampuan negara bangsa untuk bangkit mengembangkan kedaulatan ekonomi. Dalam suasana baru tersebut gagasan kedaulatan ekonomi benar-benar ditantang, sekurang-kurangnya oleh (1) kekuatan pasar dan (2) oleh munculnya kekuatan perdagangan regional di Amerika, Eropa dan Asia Tenggara dan Asia Timur.

Dalam perkembangan terbaru tersebut, kedaulatan ekonomi tidak lagi dapat dipertahankan dengan mengembangkan pendekatan lama: otoritas dan kontrol atas kemampuan domestik, pemerintahan yang sentralistis (Soekarno dan Soeharto), dan campur tangan negara dalam segala bidang. Kita mungkin tidak dapat kembali lagi ke pendekatan intervensi pasar domestik. Lalu, pertanyaan utama yang harus dijawab oleh para pemikir sekarang adalah manakah pendekatan yang melibatkan intervensi negara di satu sisi dan pasar di sisi lain. Manakah titik Archimedes yang dapat menjembatani antara peranan negara dan pasar, yang membuat kita tidak mendepak negara dan mendukung pasar, atau sebaliknya, tetapi justru menempatkannya dalam sebuah kerangka yang lebih luas sehingga negara dan pasar dapat memainkan peranan yang signifikan?

Pertanyaan-pertanyaan di atas merupakan pertanyaan umum yang bisa dijawab oleh setiap pemikir baik dalam wacana teoritis maupun dalam wacana praktis. Frans Seda yang memainkan peranannya di beberapa tahun terakhir pemerintahan Soekarno dan awal pemerintahan Soeharto dan selanjutnya

MIKHAEL DUA – KEDAULATAN EKONOMI DAN KEBAIKAN BERSAMA:  
SEBUAH REFLEKSI FILSAFAT BERSAMA FRANS SEDA

menjadi pengamat ekonomi yang kritis atas kebijakan Soeharto, dan kemudian berperan penting pada masa pemerintahan Megawati Soekarnoputri sebagai penasihatnya, memiliki konsep dasar tentang kedaulatan ekonomi. Dalam pelbagai peranan dan refleksi tersebut, Frans Seda memiliki pandangannya sendiri mengenai kedaulatan ekonomi. Tesisnya kurang lebih berbunyi: kedaulatan ekonomi tidak dapat dikembangkan dengan baik tanpa basis penghargaan terhadap pribadi manusia, peningkatan peranan masyarakat, dan tercapainya kebaikan bersama. Dengan dasar pemikiran ini, ekonomi tidak dapat lepas dari kerangka normatif etika mengenai penghargaan terhadap pribadi manusia, pengembangan masyarakat lokal, dan kebaikan bersama itu. Bahkan kerangka normatif etika tersebut justru menjadi segi-segi penting dari penegakan kedaulatan ekonomi dan keikutsertaan Indonesia dalam globalisasi ekonomi.

### 3. KEDAULATAN EKONOMI DAN KEPENTINGAN NASIONAL

Frans Seda kerap kali dikenal sebagai seorang teknokrat karena menjadi salah seorang tokoh penting pada awal pemerintahan Orde Baru. Predikat ini tidak salah sama sekali, karena hampir semua rekan kerjanya di bidang ekonomi pada waktu menangani krisis di awal Orde Baru adalah tamatan Berkeley (University of California). Kelompok ini juga yang memainkan peranan amat sangat besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia periode 1970-1980.

Namun demikian, berbeda dari rekan-rekan kerjanya pada awal Orde Baru, Frans Seda memiliki latar belakang sosial kultural dan pendidikan yang amat jauh dari rekan-rekannya. Pada tahun 1950 Frans Seda meninggalkan Indonesia dan belajar ekonomi di *Katholieke Economische Hogeschool*, Sekolah

Tinggi Ilmu Ekonomi, Tilburg hingga tahun 1956. Keberadaannya di Tilburg didorong kuat oleh motif keprihatinan misi Gereja Katolik atas keterbelakangan dan kemiskinan Flores yang belum tersentuh sama sekali program nasional di bidang pendidikan dan ekonomi. Frans Seda dipersiapkan oleh Gereja Katolik Flores untuk menangani tugas-tugas misi dalam bidang pendidikan dan ekonomi.

Juga di sekolah ini ia tidak hanya belajar ilmu ekonomi tetapi sosiologi dan filsafat sosial yang oleh pendirinya M.J.H. Cobbenhagen dilihat sebagai ilmu-ilmu yang memberikan latar belakang bagi setiap sarjana ekonomi agar dapat mengabdikan ilmunya dengan baik dalam sebuah masyarakat. Dalam perspektif tersebut, ilmu ekonomi tidak dapat dipisahkan dari pergulatan masyarakat.<sup>4</sup> Juga, dalam konteks pendidikan di Tilburg, Seda sendiri sudah terlibat dalam gerakan St. Vincentius yang memberikan perhatian pada anak-anak miskin dan terlantar. Dengan latar belakang ini, Seda sendiri sudah mengasah pikiran dan hatinya pada masalah ekonomi sebagai masalah sosial yang harus ditangani dengan pendekatan-pendekatan yang komprehensif. Dengan alasan tersebut, ketika dipercaya untuk menangani persoalan-persoalan bangsa, Seda, lebih dari para teknokrat dalam bidang ekonomi, mencoba mengkaitkan pemecahan masalah ekonomi dengan “konteks situasi negara dan bangsa.”<sup>5</sup> Motto “memahami masyarakat” Sekolah Tinggi Ekonomi Tilburg benar-benar membuat ia tidak mudah terjebak pada spesialisasinya sebagai ekonom, tetapi menempatkan ilmu ekonomi sebagai instrumen untuk transformasi masyarakat.

Terutama dalam latar belakang sekolah tinggi ini ia tidak dapat dinilai sebagai seorang neo-liberalis. Latar belakang Eropa pada tahun 1950-an



membuat ia sendiri lebih dipengaruhi oleh Keynes yang melihat pentingnya pendekatan intervensi negara namun pada saat yang sama memberikan pengakuan yang seimbang tentang pentingnya pasar bebas. Ia sendiri memiliki peta yang luas tentang aliran-aliran besar ekonomi seperti liberalisme, kolektivisme, dan aliran-aliran ekonomi jalan tengah yang memberikan perhatian pada solidaritas. Namun, dalam tulisannya yang berjudul “Aliran Ekonomi Modern” Seda sendiri menunjukkan minatnya yang besar pada pemikiran Keynes. Ia menulis: “Keynes tetap menghormati inisiatif partikelir dan mengakui pula akibat-akibat yang sehat dari mekanisme harga bebas. Namun, semua itu ternyata tidak cukup kuat mendorong perekonomian ke arah *full employment*. Maka dari itu, harus ditambahkan dengan aktivitas pemerintah. Dengan itu Keynes secara sadar memasukkan “intervensi negara” dalam *blue print* liberal.”<sup>6</sup>

Ringkasan pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun terlibat dalam skenario besar menata langkah-langkah konkret pengembangan ekonomi pada awal Orde Baru, Frans Seda di satu sisi memosisikan dirinya bukan sebagai sosialis, namun demikian, di sisi yang lain, dalam dukungannya terhadap prinsip kebebasan pasar ia berusaha mengatasi liberalisme. Bahkan ketika secara praktis bekerja sama dengan para ahli ekonomi Berkeley, Frans Seda memahami dengan baik logika pragmatisme-liberal yang selalu mencari *the art of the possible* dalam memecahkan masalah-masalah ekonomi.<sup>7</sup> Misalnya sebagai menteri keuangan, ia mendukung deregulasi dan liberalisasi pasar dengan mendaftarkan kembali Indonesia sebagai anggota Bank Dunia dan IMF. Ia juga tidak ragu-ragu melakukan *lobbying* dengan negara Eropa untuk penjadualan kembali utang-utang luar negeri. Namun demikian, kedua tindakannya tersebut tidak dikarenakan IMF, Bank Dunia dan Negara-Negara Eropa penting, tetapi

semata-mata karena keanggotaan dalam IMF dan Bank Dunia serta relasi dengan negara-negara Eropa merupakan sebuah langkah untuk mendapatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia, terutama setelah Indonesia mengalami inflasi hingga 650% sebagai akibat mismanajemen anggaran belanja negara pada masa kepemimpinan Soekarno.

Sebaliknya, kepercayaan internasional (bantuan internasional) tersebut tidak membuat ia tutup mata pada kemampuan nasional untuk menangani perekonomiannya sendiri. Pikiran pokok ini menjadi dasar dari prinsip Anggaran Berimbang. Prinsip tersebut dapat dilihat sebagai langkah untuk mengstabilisasikan ekonomi dalam keadaan krisis. Prinsip ini secara sederhana menegaskan bahwa pengeluaran dan penerimaan harus dibuat sedemikian rupa sehingga berimbang. Jika pengeluarannya lebih besar dari penerimaan, maka defisitnya harus dibiayai oleh pinjaman luar negeri. Prinsip tersebut bermanfaat untuk mencegah inflasi pada tahun 1966. Namun, ia sendiri sadar bahwa penerapan prinsip anggaran berimbang menjadi tidak sehat lagi jika pinjaman luar negeri menjadi beban generasi yang akan datang, sementara sumber-sumber pendapatan dalam negeri seperti pajak tidak dikelola dengan baik. Seda sendiri mengatakan bahwa Indonesia “kaya dengan hasil-hasil seperti minyak, timah, karet dan kopra”<sup>8</sup> yang belum dikelola dengan baik untuk kepentingan nasional. Pinjaman luar negeri harus dilihat sebagai pelengkap pembangunan bukan sebagai sumber utama pembiayaan pembangunan.

Dengan memberikan kepercayaan pada kemampuan dalam negeri dan kepentingan nasional yang lebih luas, Seda dapat dengan leluasa mengkritik pendekatan yang terlalu paternalistik dari negara, birokratisasi, korporasi monopolistik. Artikel-artikelnya akhir tahun 1950-an dan awal tahun 1960-

MIKHAEL DUA – KEDAULATAN EKONOMI DAN KEBAIKAN BERSAMA:  
SEBUAH REFLEKSI FILSAFAT BERSAMA FRANS SEDA

an ditandai oleh kritiknya terhadap “proses menegarakan ekonomi,” sebuah proses penguasaan negara atas proses-proses produksi dan distribusi dalam negeri. Menurut Seda, sesuai dengan konstitusi negara memang memiliki peranan utama dalam urusan kesejahteraan, namun konstitusi juga memberikan ruang bagi inisiatif swasta untuk mengambil bagian dalam proses produksi dan distribusi tersebut. Pendekatan yang terlalu sentralistis dan paternalistis dari negara, menurut Seda, memiliki hubungan erat dengan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pendekatan intervensionalistis dan paternalistis tersebut menjadi akar dari ekonomi biaya tinggi di Indonesia. Dengan dasar tersebut ia mendukung debirokratisasi dan deregulasi dalam bidang ekonomi. Langkah-langkah ini tidak hanya melawan ekonomi biaya tinggi tetapi juga KKN di birokrasi.<sup>10</sup>

Langkah-langkah menuju debirokratisasi ekonomi tersebut tentu bukan hal yang mudah diambil. Sejarah ekonomi Indonesia, menurut Frans Seda, tidak lebih dari pergumulan antitesis antara birokratisasi dan debirokratisasi.<sup>11</sup> Periode 1956-1966, merupakan periode sentralisasi kekuasaan di bawah Soekarno. Meskipun kepentingan-kepentingan daerah mulai diperhatikan pada awal tahun 1960-an, seluruh perkembangan ekonomi masih di bawah payung “Ekonomi Terpimpin.” Setelah itu, awal Orde Baru tahun (1966-1973) dilihat Seda sebagai sebuah periode deregularisasi dan debirokratisasi. Pada periode ini, kebijakan-kebijakan Soeharto benar-benar menjadi antithesis dari pendekatan sentralistis Soekarno yang melihat politik sebagai panglima kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Namun, periode debirokratisasi tersebut tidak bertahan lama dan segera disusul dengan sentralisasi, regulasi dan birokratisasi dalam kurun waktu 1973-1983. Setelah itu terjadi proses deregulasi

dan debirokratisasi hingga krisis moneter tahun 1997. Proses deregulasi dan debirokratisasi tersebut menjadi tuntutan, karena pada periode ini Indonesia, melalui Kementerian Negara Riset dan Teknologi, didorong untuk memasuki fase tinggal landas untuk menjadi negara industri. Proses tersebut menuntut Indonesia untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Ketika birokratisasi dan regulasi menonjol, negara menjadi alat para pengusaha konglomerat, lalu ketika terjadi proses debirokratisasi dan deregulasi, pertumbuhan ekonomi dapat menjadi urusan setiap warga melalui usaha berskala kecil (pribumi) dan koperasi yang menjadi perhatian utama pada masa reformasi di Indonesia.

Hal paling mencemaskan dari gejala sentralisasi dan birokratisasi adalah ketidakadilan sosial dan jurang yang lebar antara kaya dan miskin. Kegagalan negara dan sekaligus kegagalan kedaulatan ekonomi dan nasionalisme ekonomi adalah jika negara tidak mampu memberikan ruang lebih besar bagi warganya untuk bangkit membangun bersamanya. Dengan mendukung debirokratisasi dan deregulasi, Seda mengharapkan terjadinya pertumbuhan ekonomi dari bawah ke atas dan negara kesejahteraan dapat tercipta.

#### **4. KEDAULATAN EKONOMI DAN GLOBALISASI**

Kedaulatan ekonomi merupakan sebuah konsep bahwa seluruh daya ekonomi perlu diarahkan untuk kepentingan-kepentingan nasional yang lebih luas sehingga bangsa yang bersangkutan dapat mengatasi masalahnya sendiri seperti pengangguran, kemiskinan, dan jurang antara kaya dan miskin. Lalu, pertanyaan kita sekarang adalah apakah gagasan ini masih dapat dipertahankan dalam zaman globalisasi ekonomi sebagaimana kita alami dewasa ini?

MIKHAEL DUA – KEDAULATAN EKONOMI DAN KEBAIKAN BERSAMA:  
SEBUAH REFLEKSI FILSAFAT BERSAMA FRANS SEDA

Pertanyaan seperti ini bukan pertanyaan khas negara-negara miskin dan sedang berkembang.<sup>12</sup> Banyak negara maju pun melihat globalisasi membawa masalah seperti bagaimana mempertahankan kesempatan kerja, kehidupan dan kesejahteraan yang sudah lama mereka nikmati? Banyak perusahaan di Negara sedang berkembang yang menggunakan tenaga-tenaga murah dengan tingkat efisiensi yang tinggi dapat memukul kegiatan-kegiatan produksi yang selama ini diandalkan di negara-negara maju. Tidak hanya itu. Banyak kebijaksanaan dan tradisi lokal yang selama ini dijadikan inspirasi bagi pengetahuan industrial Negara-negara maju, seperti konsep ‘*man maximum, machine minimum*’ pada industri mobil *Honda City*,<sup>13</sup> dapat diabaikan demi efisiensi. Kita juga bisa membayangkan bahwa di hampir setiap negara menguatirkan masalah ini: apakah seluruh dunia harus beradaptasi dengan sebuah model ekonomi yang didominasi pasar dan marginalisasi negara?

Gagasan kedaulatan ekonomi tidak berarti membangun diri dalam isolasi dari dunia dan oppotunitas yang diberikan globalisasi. Juga kedaulatan ekonomi tidak berarti kembali ke nasionalisme ekonomi sempit dengan proteksi penuh dan menolak fungsi-fungsi pasar. Lalu, pertanyaan kita sekarang adalah: bagaimana negara maju masih dapat mempertahankan kesejahteraannya dan bagaimana negara-negara sedang berkembang dapat menghapus kemiskinan tanpa menimbulkan exploitasi manusia dan alam.

Meskipun Frans Seda tidak banyak berbicara tentang globalisasi, namun sejak tahun tahun 1958, Seda sudah secara kritis menanggapi semangat liberalisme yang menjadi dasar filosofis globalisasi dewasa ini. Dalam tulisannya yang berjudul “Aliran-Aliran Ekonomi Modern,” Seda menjelaskan bahwa liberalisme bergerak di atas prinsip *laissez faire*, dengan tuntutan terciptanya

“pasar terbuka” di atas dasar kebebasan yang sebesar-besarnya. Dewasa ini liberalisme klasik tersebut mengubah dirinya dalam neoliberalisme yang melihat konkurensi sebagai dasar dari ekonomi nasional dan internasional. Menurut Seda, konsep ini mempengaruhi politik pemulihan dan rekonstruksi ekonomi di beberapa negara Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Jerman (Barat) dan Belgia menikmati keberhasilan faham tersebut. Namun, Seda pun sadar bahwa globalisasi ekonomi tidak seluruhnya berhasil tanpa memperhatikan beberapa prinsip kedaulatan ekonomi sebagai berikut:

Prinsip pertama adalah *critical mass*. “Masyarakat baru”, demikian Seda mengatakan, “perlu pendapat-pendapat kritis dan segar”.<sup>14</sup> Proposisi ini penting karena kedaulatan ekonomi tidak akan bertahan jika sebuah negara tidak membangun dirinya dengan sikap kritis atas globalisasi tersebut. Indonesia dapat menunjukkan sikap kritis tersebut bersama dengan rekan-rekannya di ASEAN.

Kedua, kebijakan-kebijakan ekonomi perlu diselaraskan dengan sistem demokrasi dalam arti seluas-luasnya yang memberi ruang bagi efisiensi, transparansi, dan pemerintahan yang tidak-birokratis. Debirokratisasi bagi Frans Seda merupakan sebuah tuntutan baru bagi masyarakat baru baik dalam rangka preservasi, pembangunan, maupun dalam rangka eksploitasi mineral dan hasil-hasil alam. Masyarakat perlu dilibatkan dalam perekonomian bangsa.

Ketiga, investasi dalam SDM. Banyak komentator luar negeri mengagumi prestasi Indonesia dalam hal ini ketika Indonesia berhasil menghapus buta huruf dalam sebuah crass-program dan Impres pendidikan dasar di awal Orde Baru. Juga di bawah Kementerian Riset dan Teknologi Indonesia berhasil

MIKHAEL DUA – KEDAULATAN EKONOMI DAN KEBAIKAN BERSAMA:  
SEBUAH REFLEKSI FILSAFAT BERSAMA FRANS SEDA

mengirimkan banyak sarjana menjalani studi lanjut dalam pelbagai profesi dan teknik. Namun, investasi SDM tersebut harus lebih luas yang melibatkan peran serta warga negara biasa. Dalam hal pengembangan SDM, Frans Seda menganut prinsip keadilan, “berilah kesempatan yang sama kepada setiap orang.”<sup>15</sup>

Keempat, pendidikan profesional dan teknik tidak cukup jika tidak disertai dengan formasi kepemimpinan yang kuat dan termotivasi oleh etika. Bagi Frans Seda formasi kepemimpinan tersebut dapat dilakukan di semua lini: elite politik, pelayanan publik, sektor non profit, masyarakat luas, komunitas bisnis dan judicial. Dalam rangka formasi kepemimpinan tersebut, Seda melihat pendidikan kader sebagai agenda politik, tidak hanya sekedar untuk mengenal prinsip-prinsip etika sebagai kenyataan abstrak tetapi sebagai landasan atau titik tolak untuk mempraktekkannya menghadapi tantangan-tantangan sosial yang ada di sekitar, terutama dalam menghadapi persoalan kemelaratn dan kemiskinan.<sup>16</sup>

Kelima, pemerintah sendiri harus mengembangkan dirinya dalam semangat ‘pasar’ dan semangat ‘negara’. Dalam hal semangat pasar, pemerintah sendiri harus efisien dan memiliki semangat enterprenerial, sedangkan dalam semangat negara, pemerintah memiliki nasionalisme di bawah prinsip desentralisasi.

Keenam, perlu ada ruang debat yang memungkinkan perkembangan visi nasional dalam hubungan kebudayaan-masyarakat, manusia pribadi, kebaikan bersama dan ekonomi.

## 5. KEDAULATAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN

Mungkin karena dilahirkan dalam pulau termiskin di Indonesia, Frans Seda memberikan perhatian yang serius pada hubungan antara tindakan-tindakan ekonomi dan kesejahteraan manusia yang hidup dalam masyarakat. Dengan fokus perhatian ini, Seda sering kali mengkaitkan ekonomi dengan masalah-masalah kemanusiaan dan masyarakat. Dalam rumusannya yang lebih eksplisit, “ilmu ekonomi adalah ilmu sosial” yang tunduk pada norma-norma susila umum dan hukum kodrat untuk menjawab masalah-masalah sosial, seperti kemelaratan dan kemiskinan.<sup>17</sup>

Dengan menempatkan ekonomi sebagai ilmu sosial, Seda menaruh minat yang besar pada apa yang dikatakan oleh liberalisme dan marxisme tentang manusia dan kesejahteraannya. Dalam artikelnya yang berjudul “Natal dan Pembangunan”, Seda menulis: “Kita menolak liberalisme dan komunisme karena pandangan mereka yang materialistis terhadap manusia. Liberalisme bersifat materialistis-individualistis, dan komunisme bersifat materialistis-kolektivistis. Apa itu? Materialistis-individualistis berpendapat bahwa yang prinsipil terpenting bagi manusia adalah nafsu kebendaan dan pemenuhan kebutuhan akan benda serta soal-soal jasmani dan perseorangan-individu. Materialistis-kolektivistis berpendapat bahwa yang prinsipil terpenting bagi manusia adalah nafsu kebendaan dan pemenuhan kebutuhan akan benda dari masyarakat kolektif/kelompok.” Melawan komunisme, Seda berpendapat, manusia lebih dari sekedar ‘*was man isst*’ (Feuerbach), karena ia dapat membuat alat sebagai perpanjangan tangannya dan dapat bekerja sama dengan orang lain (Aristoteles) untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Melawan liberalisme kapitalis, ia menjelaskan manusia tidak sekedar *homo economicus* yang hanya



mengejar keuntungan, kebesaran, dan penguasaan akan materi, yang dibimbing oleh prinsip *struggle for ever* atau *free fight competition*.<sup>18</sup> Secara positif, dengan berpijak pada pikiran Kristianinya, Seda melihat manusia sebagai keutuhan rohani dan jasmani yang tidak hidup dari roti saja melainkan dari sabda, tidak dari *struggle*, tetapi dari cinta kasih dan solidaritas. Kemakmuran material diarahkan ke pembentukan pribadi manusia.

Dengan dasar pemikiran Kristiani tersebut, Seda melihat masalah kemiskinan merupakan masalah ekonomi, dan masalah ekonomi menjadi masalah manusia. Ia menulis: “Kemiskinan jasmani merupakan bahaya yang pokok bagi hidup rohani dan sebaliknya kemiskinan kehidupan rohani merupakan bahaya besar bagi manusia.”<sup>19</sup> Dengan kesadaran akan fakta dan pengalaman kemiskinan masyarakat Flores dan Indonesia, Seda melihat ekonomi memiliki tugas sosial-politik, yaitu mensejahterakan bangsa. Yang ia maksud dengan kesejahteraan adalah “suatu kondisi kecukupan dan kemakmuran material dan spiritual yang ditandai oleh tata tenteram, *karto raharjo* dan dinikmati oleh seluruh rakyat, bukan oleh individu atau pun segelintir golongan masyarakat.”<sup>20</sup>

Dengan pemahaman mengenai kesejahteraan ini, Seda membuat sebuah loncatan terhadap gagasan utilitarianisme para ekonom seperti John Stuart Mill, Henry Sidgwick, dan Alfred Marshal. Dalam perspektif utilitaristis, kesejahteraan memiliki hubungan dengan konsep kegunaan dalam tiga arti.<sup>21</sup> Yang pertama, kegunaan berhubungan pilihan pribadi atas alternatif yang ada. Sesuatu dikatakan berguna karena telah menjadi pilihan. Kedua, kebahagiaan identik dengan kondisi mental, seperti rasa senang. Dan terakhir, utilitarianisme kerap mengidentifikasikan kesejahteraan dengan pemuasan

keinginan atau preferensi. Dalam pemikiran utilitarian, kenyataan psikologis ini dapat dihitung sehingga hanya sebuah kebijakan dengan preferensi tertinggi yang dapat diambil. Yang tidak pernah dipikirkan oleh kaum utilitarian adalah bahwa pilihan dan preferensi kerap berhubungan dengan nilai yang dapat dipilih bukan karena rasa senang tetapi karena ia bernilai.

Dengan gagasan bahwa rakyat harus menjadi subyek kesejahteraan, Seda menarik implikasi etis dari apa yang tertulis dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut Seda, dalam pasal ini para pendiri bangsa Indonesia sudah memberikan prinsip penataan pembangunan ekonomi, yaitu melaksanakan kesejahteraan sosial berdasarkan prinsip keadilan. Dalam cita-cita kesejahteraan tersebut ekonomi bukanlah monopoli pemerintah, bukan juga monopoli pebisnis, tetapi sebuah tindakan bersama yang melibatkan pemerintah, pebisnis, dan koperasi yang dapat digerakkan oleh masyarakat biasa.

Berdasarkan semangat konstitusional tersebut Frans Seda mendesak agar pemerintah merumuskan dengan jelas “peranan dan posisi masing-masing unit tersebut (negara, swasta, dan koperasi) dalam tata susunan ekonomi dan sistem *building* nasional kita, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dapat berjalan dengan lancar.”<sup>22</sup> Frans Seda percaya bahwa pengusaha swasta dan rakyat biasa dapat mengambil inisiatif lebih leluasa dalam mengembangkan perekonomian Indonesia. Dibutuhkan kondisi sosial politik yang kondusif sehingga inisiatif dapat diambil tanpa risiko yang tidak dapat mereka tanggung.

Dengan keyakinan ini, pada dekade 1970-an Frans Seda mengkritik pendekatan keamanan yang kerap digunakan Soeharto untuk mengamankan

pembangunan. Dalam banyak tulisannya ia selalu mengatakan bahwa pendekatan keamanan hanya penting untuk *survival* sebuah bangsa. Namun manakala pendekatan ini dipakai untuk *survival* golongan orang demi prestise dan jabatannya, maka pendekatan tersebut dapat menimbulkan keresahan. Dalam perspektif etika, menurut Frans Seda, pembangunan ekonomi dapat berhasil jika mendapat dukungan luas masyarakat. Karena itu demokrasi menjadi sebuah prosedur penting dalam pembangunan ekonomi. Berkali-kali ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat didukung oleh pendekatan keamanan, tetapi oleh demokrasi dalam ‘makna aslinya’ yaitu: kesempatan sama untuk semua. Kesejahteraan yang dicita-citakan oleh semua elemen bangsa hanya terjadi jika setiap orang diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.<sup>23</sup>

Secara khusus Frans Seda memberikan perhatian pada inisiatif rakyat di pedesaan. Dalam tulisannya yang berjudul “Rakyat Sikka yang Minum Air Pisang” Frans Seda secara tegas mengatakan bahwa “Pembangunan daerah dan peningkatan taraf hidup rakyat adalah hak asasi dan hak konstitusional rakyat di daerah dan merupakan kewajiban bagi Pemerintah. Maka tiap kekurangan yang dialami di daerah menunjukkan suatu kekurangan dalam pemerintah melakukan kewajibannya.”<sup>24</sup> Mungkin karena ia adalah anak desa, Frans Seda mengagumi rakyat di pedesaan. Tidak ada sebuah titik sinisme apa pun dalam dirinya terhadap orang-orang desa. Sebaliknya, ia malah menegaskan: “Rakyat di daerah terpencil menjadi contoh kebesaran dan ketahanan mental bangsa Indonesia. Mereka dipencilkan dari perencanaan, pelaksanaan, komunikasi dan perhatian, tetapi mereka tidak pernah memencilkan diri dari kehidupan dan persatuan bangsa.”<sup>25</sup>

Dengan keyakinan bahwa masyarakat dapat dilibatkan dalam pembangunan, Frans Seda melihat pendidikan perlu dilihat sebagai prioritas utama dalam pembangunan. “Pendidikan dalam hubungannya dengan peningkatan akhlak, mutu dan ketrampilan manusia menempati tempat lebih sentral dan strategis dari ekonomi. Ekonomi mengenai faktor-faktor ekonomi seperti modal, tanah, dan tenaga. Modal dan tanah adalah faktor mati yang masih perlu digerakkan oleh tenaga dan daya mampu organisasi manusia untuk dapat berfungsi sebagai faktor-faktor produksi.”<sup>26</sup> Bagi Frans Seda pendidikan merupakan langkah strategis bagi peningkatan kapabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam konteks keadilan ekonomi tersebut persoalan dasar yang harus dijawab adalah bagaimana setiap subyek ekonomi dapat mengembangkan kesejahteraannya dan kebebasannya. Dan jalan itu adalah pendidikan.<sup>27</sup>

## 6. PENUTUP

Melihat apa yang dipikirkan Frans Seda tentang kedaulatan ekonomi, kita boleh mengatakan bahwa Frans Seda memiliki tafsirannya sendiri tentang apa artinya keIndonesiaan dalam bidang ekonomi. Bagi Frans Seda, keIndonesiaan berarti bangsa Indonesia yang memiliki kaki dan kepalanya sendiri yang tahu berdiri tegak menghadapi bangsa-bangsa lain tetapi juga punya pendirian sendiri, sehingga tidak mudah dikontrol oleh bangsa-bangsa lainnya. Ini artinya kedaulatan ekonomi. Namun sebagaimana dikemukakan di atas kedaulatan ekonomi juga berarti sebuah bangsa perlu membangun jejaring dengan bangsa-bangsa lain. Tujuannya adalah agar bangsa sendiri mencapai kemajuan dan kesejahteraan. Jejaring dengan bangsa-bangsa lain memungkinkan suatu bangsa

MIKHAEL DUA – KEDAULATAN EKONOMI DAN KEBAIKAN BERSAMA:  
SEBUAH REFLEKSI FILSAFAT BERSAMA FRANS SEDA

memahami dirinya dengan baik dan kemampuan-kemampuannya.

Dengan demikian kedaulatan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesejahteraan. Di satu sisi, kedaulatan ekonomi tidak memiliki pijakannya jika manusia tidak mengalami kesejahteraan. Sebagaimana dikemukakan di atas, kesejahteraan tidak sekedar fakta ekonomi yang hanya bisa diukur oleh pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Dalam interpretasi Seda, kesejahteraan merupakan fakta moral manusia karena manusia dan suatu bangsa tidak mungkin hidup tanpa kesejahteraan sebagai nilai. Manusia hanya dapat menjadi manusia kalau ia sejahtera. Sebagai fakta moral, kesejahteraan menjadi ukuran agar manusia menjadi manusia. Ini berarti kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai manusia dengan segala tingkatan yang sepadan dengan kebutuhannya sebagai manusia mulai dari taraf kebutuhan material, kesehatan, kebutuhan sosial, hingga kebutuhan menjadi diri sendiri merupakan sebuah fakta moral. Tentu kebutuhan ini tidak bisa dinilai sebagai fakta moral jika tidak disusul dengan refleksi.

Namun, di sisi lain, kedaulatan ekonomi dapat dilihat sebagai kriteria untuk mencapai kesejahteraan. Bagaimana mungkin sebuah masyarakat dapat mencapai kesejahteraan, jika masyarakat tersebut tidak memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk mengolah sumber daya yang ada pada dirinya sendiri? Ketergantungan yang berlebihan pada bantuan asing dapat membahayakan kemandirian sebuah bangsa. Begitu juga pendekatan paternalistis dan birokratisasi dapat memperlemah partisipasi masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam hati kecil Seda rakyat memiliki kepercayaan diri yang kuat atas kemampuannya untuk mengolah ekonominya. Yang dibutuhkan adalah pendidikan dan jejaring yang memungkinkan mereka dapat berkembang dalam

konteks sosial kulturalnya. Tanpa konsep kemandirian dan kedaulatan ekonomi, kita mustahil membangun peta partisipasi masyarakat untuk menentukan kriterianya sendiri bagi kesejahteraannya.

## CATATAN AKHIR

<sup>1</sup> Yang saya maksud dengan filsafat ekonomi adalah sebuah kajian filosofis tentang pilihan-pilihan atau kebijakan ekonomi, arahnya, dan strategi-strateginya. Pertanyaan-pertanyaan pokok yang menjadi orientasi dasar dari filsafat ekonomi adalah apakah kebijakan ekonomi tersebut memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan ekonomi dan peningkatan keagenan, serta menciptakan keadilan sosial. Pandangan pokok ini dapat dibaca dalam buku, Mikhael Dua, *Filsafat Ekonomi* (Yogyakarta: Kanisius 2009).

<sup>2</sup> J.J.A.M. van Gennip, “Reconstructing the Indonesian Economic Sovereignty,” paper yang disampaikan pada tanggal 4 Oktober 2006 di Universitas Katolik Atma Jaya, Jakarta

<sup>3</sup> Frans Seda, *Simfoni tanpa Henti, Ekonomi Politik Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Grasindo, 1992), hal. 18-23. Tentang sosialisme Indonesia ini, Seda menulis pada halaman 21 sebagai berikut: “Kepada Tuan Dr. Schacht, ahli ekonomi dari Jerman yang menganjurkan untuk bekerja keras dan sekali lagi bekerja keras, untuk menanggulangi masalah ekonomi, Bung Karno menjawab: “For what and for whom – for Capitalism?” Cetusan-cetusan momentan ini tidak mengecilkan sikap dan wawasan dasar beliau, yakni kepedulian fundamental terhadap rakyat kecil, kemiskinan, dan kebodohan rakyat banyak, suatu kepedulian sosial yang beliau jadikan dasar, warna, dan watak dari nasionalisme dan kemerdekaan Indonesia secara brilian beliau sampaikan sebagai pembelaan beliau di depan pengadilan kolonial tahun 1924.” Penafsiran Seda ini kemudian dilanjutkan dengan pernyataan sebagai berikut. “Politiklah menjadi prioritas utama dan norma politik menjadi norma utama dalam mengadakan pilihan-pilihan termasuk pilihan-pilihan dalam bidang ekonomi.” Pilihan tersebut merupakan norma dari seluruh bangsa dan negara yang bergumul untuk survive dalam sendi-sendi dasarnya seperti kesatuan, persatuan, dan ideologi.

MIKHAEL DUA – KEDAULATAN EKONOMI DAN KEBAIKAN BERSAMA:  
SEBUAH REFLEKSI FILSAFAT BERSAMA FRANS SEDA

<sup>4</sup> Erik P.N.M. Borgman, *Tilburg University Met het oog op goed leven Cobbenhagen en onze universitaire cultuur* (Tilburg: Tilburg University, 2011), hal. 41-44

<sup>5</sup> Frans Seda, *Simfoni tanpa Henti, Op. Cit.*, hal. 21

<sup>6</sup> *Ibid.*, hal. 33

<sup>7</sup> Rizal Ramli, “Frans Seda dalam Sejarah Ekonomi Indonesia” dalam Frans Seda, *Simfoni tanpa Henti, Op. Cit.*, hal. xlv

<sup>8</sup> Frans Seda, *Simfoni tanpa Henti, Op. Cit.*, hal. 36

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 100

<sup>10</sup> J.J. van Gennip, *Frans Seda's Legacy in the 21th Century, the Need for Value-Based Leadership for a World in Transition* (Tilburg: Tilburg University, 2014), hal. 14

<sup>11</sup> Frans Seda, *Simfoni tanpa Henti. Op. Cit.*, hal. 138-140

<sup>12</sup> J.J.A.M. van Gennip, “Reconstructing the Indonesian Economic Sovereignty”, *Op. Cit.*, hal. 7

<sup>13</sup> Prinsip ini pernah digunakan oleh Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi untuk menjelaskan keunggulan mobil-mobil Asia menghadapi mobil-mobil Barat. Lihat Ikujiro Nonaka dan Hirotaka Takeuchi, *The Knowledge-Creating Company* (Oxford: Oxford University Press, 1995), hal. 12

<sup>14</sup> Kalimat ini tertera sebagai kenangan atas buku Frans Seda, *Simfoni tanpa Henti*, tanggal 4/3 1992. Buku tersebut menjadi milik perpustakaan Atma Jaya.

<sup>15</sup> Kutipan ini dapat dibaca pada Taman Frans Seda di antara Gedung C dan Gedung D di Universitas Katolik Atma Jaya, Jalan Jenderal Sudirman No. 51, Jakarta

<sup>16</sup> Frans Seda, *Simfoni tanpa Henti, Op. Cit.*, hal. 97-98

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal. 103

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal. 95-96

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 96

<sup>20</sup> Frans Seda, *Kekuasaan dan Moral, Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru* (Jakarta: Grasindo, 1996), hal.. 7

<sup>21</sup> Amartya Sen, “Well-Being, Agency, and Freedom, the Dewey Lectures 1984” *The Journal of Philosophy* Vol. LXXXII, No. 4, April 1985: hal. 187-190

<sup>22</sup> Frans Seda, *Simfoni Tanpa Henti, Op. Cit.*, hal. 246

<sup>23</sup> *Ibid.*, hal. 192

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal. 304

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*, hal. 193

<sup>27</sup> Pikiran yang sama dikembangkan oleh Amartya Sen. Lihat Amartya Sen, *Development as Freedom* (New York: Anchor Books, 1999), hal. 202

## DAFTAR PUSTAKA

- Borgman, Erik P.N.M. (2011). *Tilburg University Met het oog op goed leven Cobbenhagen en onze universitaire cultuur*. Tilburg: Tilburg University
- Dua, Mikhael. (2008). *Filsafat Ekonomi, Upaya Mencari Kesejahteraan Bersama*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nonaka, Ikujiro dan Takeuchi, Hirotaka. (1995) *The Knowledge-Creating Company* Oxford: Oxford University Press.
- Ramli, Rizal. (1992). “Frans Seda dalam Sejarah Ekonomi Indonesia” dalam Frans Seda, *Simfoni tanpa Henti, Ekonomi Politik Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Seda, Frans. (1996). *Kekuasaan dan Moral, Politik Ekonomi Masyarakat Indonesia Baru*. Jakarta: Grasindo
- Seda, Frans. (1992). *Simfoni tanpa Henti, Ekonomi Politik Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Grasindo
- Sen, Amartya. (1999). *Development as Freedom*. New York: Anchor Books
- Sen, Amartya. (April 1985). “Well-Being, Agency, and Freedom, the Dewey Lectures 1984” *The Journal of Philosophy* Vol. LXXXII, No. 4: hlm. 187-190
- Van Gennip, J.J. (2014). *Frans Seda’s Legacy in the 21th Century, the Need for Value-Based Leadership for a World in Transition*. Tilburg: Tilburg University



MIKHAEL DUA – KEDAULATAN EKONOMI DAN KEBAIKAN BERSAMA:  
SEBUAH REFLEKSI FILSAFAT BERSAMA FRANS SEDA

Van Gennip, J.J.A.M. “Reconstructing the Indonesian Economic Sovereignty,”  
paper yang disampaikan pada tanggal 4 Oktober 2006 di Universitas  
Katolik Atma Jaya, Jakarta

